

**PERAN KEPALA DESA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM
PENURUNAN STUNTING DESA GARUNGUNG KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN
TABALONG KALIMANTAN SELATAN**

Liska* ; Wahyu Subadi

Liskaa.liss@gmail.com ; Wahyusubadi5@gmail.com

Program Studi Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Komplek Stadion Olah Raga Saraba Kawa Pembataan Tanjung-Tabalong
Telp/Fax (0526)2022484 Kode Pos 71571
Email : info@stiatabalong.ac.id

ABSTRAK

Masalah gizi stunting merupakan salah satu masalah gizi yang krusial/gawat khususnya pada negara-negara miskin dan berkembang, kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini mengakibatkan terhambatnya perkembangan fisik, menurunnya imun pada anak yang mengakibatkan sering sakit, menghambat perkembangan mental dan yang paling fatal mengakibatkan kematian balita, Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kepala Desa Terhadap Kesehatan Masyarakat Dalam Program Penurunan Stunting Desa Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif kualitatif*. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan 5 *informan* yang dianggap memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model interaktif yaitu Pengumpulan Data (*Data Collection*), Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data (*Conclusion Drawing atau Data Verifikation*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa Terhadap Kesehatan Masyarakat Dalam Program Penurunan Stunting Desa Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dikategorikan Cukup Berperan

Kata Kunci: Peran Kepala Desa, Kesehatan Masyarakat, Stunting

***THE ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN PUBLIC HEALTH FOR THE STUNTING REDUCTION
PROGRAM IN GARUNGUNG VILLAGE, TANJUNG DISTRICT, TABALONG REGENCY, SOUTH
KALIMANTAN***

ABSTRACT

Stunting is a critical nutritional issue, particularly in low-income and developing countries. Malnutrition during a child's early growth and development can lead to inhibited physical development, weakened immunity causing frequent illness, hampered mental development, and most critically, an increased risk of infant mortality. This research aims to explore the role of the Village Head in public health within the stunting reduction program in Garunggung Village, Tanjung District, Tabalong Regency, South Kalimantan. This study employs a qualitative descriptive research method. The research utilized a purposive sampling technique, involving 5 informants selected for their relevant knowledge regarding the study. Data was gathered through observation, documentation, and interviews. The data analysis followed an interactive model, encompassing Data Collection, Data Reduction, Data Display, and Conclusion Drawing or Data Verification. The findings indicate that the role

of the Village Head in public health for the stunting reduction program in Garunggung Village, Tanjung District, Tabalong Regency, South Kalimantan, is categorized as Moderately Involved.

Keywords: *Role of Village Head, Public Health, Stunting*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Secara umum beberapa negara sepakat bahwa kesehatan merupakan indikator penting dalam mewujudkan kemajuan bangsanya banyak permasalahan dalam bidang kesehatan didunia yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan di berbagai kalangan dari sekian banyaknya permasalahan dalam bidang kesehatan adalah tingginya kematian ibu dan anak didunia terutama yang terjadi di Indonesia di wilayah perdesaan, masalah gizi stunting merupakan salah satu masalah gizi yang krusial/gawat khususnya pada negara-negara miskin dan berkembang, kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini mengakibatkan terhambatnya perkembangan fisik, menurunnya imun pada anak yang mengakibatkan sering sakit, menghambat perkembangan mental dan yang paling fatal mengakibatkan kematian balita yang mengalami masalah gizi stunting maka berisiko terjadinya penurunan kemampuan “*intelektual, produktivitas, resiko mengalami penyakit di masa mendatang* berdasarkan data *UNICEF* dan *WHO* angka *prevalansi* stunting Indonesia menempati urutan tertinggi ke-27 dari 154 negara yang memiliki data stunting, menjadikan Indonesia berada pada di urutan ke-5 diantara negara-negara di Asia. (KEMENKO PMK, 2023). Stunting di Indonesia dimulai pada tahun 2007 rikerdesa tahun 2007 menunjukkan bahwa stunting di Indonesia berada pada kisaran 36,8% mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 35,6% dan pada tahun 2013 stunting di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 37,2% data tertinggi pada Riskesdes, setelah kasus peningkatan angka stunting pada tahun 2013 mulai menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia sehingga kebijakan

dilaksanakan untuk mengurangi atau menekan angka stunting di Indonesia.

Di buktikan dengan penurunan angka stunting di Indonesia pada tahun 2016 secara global prevalansi stunting di Indonesia masih dikategorikan tinggi dan belum mencapai target pada tahun 2019 sebesar 3,1% penurunan kasus stunting belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah percepatan penurunan stunting pada balita menjadi program prioritas pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 (Intoniswan, 2024). Angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 21,6% berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, hasil riset (SSGI) dimana pada tahun 2022 terdapat 18,5% bayi dilahirkan dengan panjang badan kurang dari 48% hasil riset tersebut cukup memprihatinkan resiko terjadi stunting meningkat sebesar 1,6 kali dari kelompok umur 6-11 bulan ke kelompok umur 12-23 bulan (13% ke 22,4%) yang mana hal ini terjadi di karenakan faktor ‘kegagalan’ pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) sejak anak umur 6 bulan baik dari segi kesuaian umur, frekuensi, jumlah, tekstur, dan variasi makanan (Kemenkas RI, 2024).

Masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat terjadi karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penyediaan biaya operasional pelayanan kesehatan, Indonesia masih dianggap sebagai negara yang kurang mampu memberikan prioritas pelayanan kesehatan untuk masyarakatnya, hal ini dibuktikan masih rendahnya alokasi dana pemerintah untuk sektor kesehatan yang jumlahnya hanya mencapai 2% dari PDB, yang mana jumlah tersebut masih sangat jauh dari yang

direkomendasikan organisasi kesehatan dunia (*World Health Organization*) merekomendasikan dana untuk sektor kesehatan minimal 5% dari PDB (Trinantoro, 2011).

Masa anak-anak merupakan masa kritis yang sangat responsif terhadap kondisi sekitar sehingga diperlukan kewaspadaan yang lebih tinggi, terutama dalam hal gizi tahap balita merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sangat penting bagi orang tua memastikan bahwa anak menerima gizi yang cukup baik kuantitas maupun kualitas yang di konsumsi anak, pada umur 12-23 bulan 'balita' biasanya melakukan aktivitas fisik tingkat tinggi dalam proses belajar keinginan tau tentang dunia luar. Apabila suatu negara melahirkan anak dalam kondisi kesehatan yang prima perkembangan jasmani dan rohani yang baik dan memperoleh pendidikan yang bermutu maka generasi tersebut akan memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan negara, stunting dikategorikan dengan tinggi badan anak dibawah rata-rata dibandingkan anak lain di usia mereka, pentingnya pencegahan stunting tidak hanya isu kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai investasi negara jika suatu negara menangani kasus stunting maka adanya upaya meningkatkan kualitas gizi sejak awal kehidupan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang seimbang menjadi langkah awal dalam mengatasi stunting.

Kesehatan merupakan bagian hal yang sangat penting yang menentukan sumber daya manusia disebuah negara. Selama ini program kesehatan yang ada di Indonesia pelayanan kesehatan yang dilakukan pada upaya agar bayi dapat lahir dengan selamat dan kelangsungan hidup anak tetapi belum terintegrasi secara penuh untuk mencapai tumbuh kembang anak secara optimal. Dibuktikan pada daerah Kalimantan Selatan. Masalah pada kasus stunting berdasarkan hasil SKI (2023) Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan menjadi 24,7%, naik 0,1%. Kemudian secara Kabupaten/ Kota yang mengalami kenaikan adalah Kabupaten Tanah Laut (41,7%), Kabupaten

Tanah Bumbu (25,1%), Kabupaten Hulu Sungai Utara (36,0%), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (25,4%), Kota Banjarmasin (26,5%), Kabupaten Banjar (30,1%), dan Kabupaten Balangan (33,4%) (KEMENDAG RI).

Hal ini harus dijadikan evaluasi, terkait berjalannya TPPS mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan bahkan Desa. Pemerintah desa sangat berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dari itu perlu adanya kewenangan dan kebijakan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya dalam program pelayanan terhadap kesehatan anak dan balita salah satu program dan kegiatan kesehatan terhadap anak dan balita salah satu program pelayanan kesehatan yang dapat diupayakan di Desa adalah kegiatan Pos Layanan Terpadu (Posyandu), Posyandu ialah wadah pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa yang dibentuk melalui musyawarah desa/kelurahan yang dikelola oleh pengelolaan posyandu. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 kesehatan sudah tidak lagi dengan perkembangan, tuntunan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-undang tentang kesehatan yang baru posyandu diharapkan dapat memberikan layanan secara terpadu kepada masyarakat, khususnya pada balita diantaranya pemeriksaan kesehatan dan peningkatan gizi.

Peran Kepala Desa di Desa Garungung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan dalam penanganan kasus stunting belum terlihat jelas bagaimana progresnya karena yang terjadi di Desa Garungung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dapat dikatakan bahwa program-program yang dilakukan pemerintah desa dalam pencegahan stunting masih bisa dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah balita yang masuk kategori stunting di desa Garungung Kec. Tanjung, Kab.Tabalong yang semakin bertambah tercatat pada tahun 2022 ada 11 balita dan 2023 ada 12 balita yang masuk dalam kategori stunting dan mengalami gizi kurang

berdasarkan pendataan pada tahun 2024 ada 17 balita di kategori Stunting terjadi peningkatan angka stunting dari tahun 2023 sebelumnya, sehingga kasus stunting di desa Garunggun pada bulan Januari 2025 ada (17) balita yang terdampak stunting.

Menyikapi hal tersebut pemerintah Desa Garunggun harus mempunyai kebijakan dalam kepemimpinan dan tindakannya untuk mengatasi permasalahan stunting dengan adanya suatu tindakan dari kepala desa untuk menangani kasus stunting setidaknya dapat untuk mencegah dengan melakukan rencana dan pelaksanaan program-program, pembagian vitamin makanan bergizi sebagai upaya pencegahan masalah stunting. Kebijakan yang dilakukan desa Garunggun yaitu melakukan penganggaran dari Dana Desa (ADD) melalui (KPM) Kader Pembangunan Manusia untuk memberikan makanan yang bersifat menambah gizi. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Garunggun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dalam hal ini kepala desa, masyarakat, orang tua dari anak-anak yang masuk dalam kategori stunting dan berbagai Lembaga sosial lainnya seperti Kader KPM yang berhubungan dengan penelitian tersebut, penelitian ini penting dilakukan karena berkaitan dengan ilmu pemerintahan untuk mengetahui persoalan dalam Peran Kepala desa dalam penanganan stunting di Desa Garunggun Kec. Tanjung Kab. Tabalong.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mendeskripsikan tentang peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesehatan anak usia lima tahun kebawah (balita) yang ada di Desa Garunggun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. Meningkatnya Stunting pada Desa Garunggun oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Terhadap Kesehatan Masyarakat Dalam Program Penurunan Stunting Desa Garunggun Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Program Penurunan Stunting Terhadap Kesehatan Masyarakat Desa Garunggun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Program Penurunan Stunting Terhadap Kesehatan Masyarakat Desa Garunggun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Manfaat Penelitian

Kategori pertama yaitu manfaat secara Teoritik dan kedua yaitu manfaat secara praktis, berikut penjelesan manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritik :

Teori peran menurut (Miftah Thoha, 2012) yang mengemukakan indikator-indikator peran kebijakan pemerintah bahwa ada tiga indikator yaitu peran sebagai figure (*figurhead*), peran sebagai pemimpin (*leader*), peran sebagai penghubungan (*liason*).

2. Manfaat Praktis

a. Akademis

Manfaat praktis yaitu untuk memecahkan masalah, bila peneliti dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksi dan mengandalkan suatu gejala (Sugiyono, 2013). Maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi aparat desa Garunggun khususnya Kepala Desa dalam pelaksanaan program penurunan stunting terhadap kesehatan masyarakat Desa Garunggun di bidang

kesehatan. Untuk pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong sebagai evaluasi perbaikan peran Kepala Desa dalam program penurunan stunting di bidang kesehatan selanjutnya.

b. Penulis

Selain itu bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan informasi tambahan serta perbandingan, khususnya yang melakukan penelitian terhadap masalah yang serupa.

LANDASAN TEORI/TINJAUAN PUSTAKA

Paradigma Ilmu Administrasi

(Nicholas Henry, 2007) Mengemukakan ada lima paradigma dalam administrasi publik yakni :

1. Paradigma Pertama, Dikotomi antara politik dan Administrasi (1900-1926) fokus dari ilmu administrasi negara terbatas pada masalah-masalah organisasi, kepegawaian dan penyusunan anggaran dalam birokrasi pemerintahan.
2. Paradigma kedua, Prinsip-prinsip Administrasi Negara (1927-1937) Fokus dari administrasi negara masalah dalam paradig ini yaitu yang penting fokusnya "prinsip-prinsip administrasi" dipandang dapat berlaku universal pada setiap bentuk organisasi dan setiap lingkungan sosial dan budaya pada masa ini administrasi negara memiliki prinsip-prinsip yang jelas yakni administrasi negara dapat diterapkan di negara mana saja walaupun berbeda, kebudayaan, lingkungan, visi dan lainnya sebab fokus memegang peranan yang penting dibandingkan lokus, prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick dan Urwick adalah POSDCORB (planning, organization, staffing, directing, reporting and budgeting).
3. Paradigma Ketiga, Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970) Paradigma ini merupakan suatu usaha menetapkan kembali hubungan konseptual antara

administrasi negara dengan ilmu politik konsekuensi dari usaha ini adalah keharusan untuk merumuskan bidang ini paling sedikit dalam hubungan dengan fokus keahliannya yang esensial dalam fase ini Waldo memprotes perlakuan ilmu politik sebagai suatu disiplin dari ASPA (*American Political Science Association*). Dalam periode ini juga terjadi sedikitpun sebab setiap prinsip administrasi ada suatu counter prinsip dan karena itu menyebabkan keseluruhan ide- dari prinsip-prinsip tersebut dapat dibantah dalam keseluruhan ide dari prinsip-prinsip tersebut dapat dibantah. Dalam bukunya *Elements of Public Administration* yang disunting oleh (Kertati, 2010:34) menunjukkan bahwa administrasi tidak akan bebas nilai dan sebenarnya nilai yang ada adalah politik.

Kebijakan

Secara etimologis istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seseorang aktor (misalnya pejabat, kelompok, maupun suatu badan pemerintah) kebijakan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. (Jones, 1995)

- a. *Goal*, atau tujuan yang diinginkan
- b. *Plan/proposal* yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan
- c. *Program* yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan

- d. *Decision* ialah tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan, dan menilai rencana
- e. *Effect* yaitu akibat-akibat dari rencana (disengaja atau tidak, primer atau skunder, diperhitungkan sebelumnya atau tidak, diestimasi sebelumnya atau tidak).

Secara umum kebijakan dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Program Kesehatan Desa

Program kesehatan desa bertujuan untuk memperbaiki status gizi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat, dan memberikan intervensi yang tepat bagi keluarga dan masyarakat di tingkat desa. Beberapa program yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Penyuluhan Gizi kepada Masyarakat
- b. Program penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang untuk ibu hamil, ibu
- c. menyusui, dan anak balita dapat dilakukan di tingkat desa. Penyuluhan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif, makanan bergizi, serta pencegahan kekurangan gizi pada anak.
- d. Pemantauan Status Gizi Anak
Pemantauan rutin terhadap status gizi anak balita (pengukuran berat badan dan tinggi badan) di posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan program yang krusial. Dengan pemantauan ini, dapat diketahui secara dini anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting, sehingga dapat segera diberikan intervensi yang sesuai.
- e. Program Pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)
- f. Program untuk memastikan anak mendapatkan MP-ASI yang bergizi pada usia yang tepat (6

bulan) adalah langkah penting untuk mencegah stunting. Desa dapat mengembangkan program pemberian MP-ASI yang berbasis pada bahan pangan lokal yang bergizi.

Melalui pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan masyarakat, pemerintah desa, dan tenaga medis, program kesehatan desa diharapkan dapat mengurangi angka stunting secara signifikan. Penyuluhan, pemantauan, serta intervensi yang tepat menjadi kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan (Rahmi, 2019)

Peran

Peran menurut terminology ialah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat, dalam bahasa inggris “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking” artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran ialah suatu tindakan yang membatasi seseorang suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Teori peran digunakan untuk menganalisis setiap hubungan antar dua orang atau lebih hubungan antar aktor dan target adalah untuk membentuk identitas aktor (person, ego, self) yang dalam hal ini dipengaruhi oleh penilaian atau sikap orang-orang lain (target) yang telah digeneralisasikan oleh aktor. Aktor menempati posisi pusat sedangkan target menempati posisi padanan dari posisi pusat tersebut maka dapat dilihat bahwa target dalam teori peran sebagai pasangan terhadap aktor. (Syamsir and Torang, 2014)

Indikator peran merupakan aspek-aspek yang menjadi ukuran dalam suatu peranan, ukuran-ukuran tersebut dijadikan tolak ukur dalam suatu peranan. Sedangkan Menurut Mintzberg dalam buku Pengantar Manajemen dan Buku Kepemimpinan Dalam Manajemen yang ditulis oleh

(Siswanto & Miftah Thoha, 2012:21) ada tiga peran yang dilakukan pemimpin dalam organisasi yaitu :

a. Peran antar pribadi (Interpersonal Role), dalam peranan antar pribadi atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung agar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar. Tiga peranan yang dikemukakan oleh Mintzberg sebagai berikut :

- 1) Peranan sebagai tokoh yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
- 2) Peranan sebagai pemimpin yakni dalam peranan ini atasan bertindak sebagai pemimpin. Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya pemimpin, memotivasi, mengembangkan dan mengendalikan.
- 3) Peranan sebagai perantara (*Liaison Manager*), disini atasan melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang yang berada diluar organisasinya untuk mendapatkan informasi.

Pada penelitian ini peneliti mengambil Teori Peran Interpersonal menurut (Henry Mintzberg, 2012) Karena di dalam teorinya terdapat unsur Tokoh (*figurehead*), pemimpin (*leader*), dan penghubung (*liaison*). Dengan demikian peran seorang pemimpin akan tampil kedalam berbagai hal yang relevan dalam mengukur Peran Kepala Desa dalam program penurunan stunting.

Pemerintah Desa Dalam Penurunan Stunting

Pemerintah Desa dikelola oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa untuk itu pemerintah desa harus memiliki peran untuk berfikir atau bertindak secara rasional dalam mengambil keputusan ditengah-tengah masyarakat dan harus memiliki peran untuk pelapor dalam proses

pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. (Rivai, 2006:148) menyatakan peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu peran diartikan juga sebagai proses dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka seorang pemimpin harus menjalankan suatu peranannya dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa.

Desa berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa menetapkan dan mengelola kelembagaan desa dan mendapatkan sumber pendapatan dan desa berkewajiban melindungi dan menjaga, persatuan kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan masyarakat desa dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa mengembangkan kehidupan demokrasi mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan memberikan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pemerintah desa.

Pemerintah desa merupakan perangkat desa yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Kepala Desa diberikan kewenangan untuk membuat peraturan desa sendiri baik peraturan mengenai pemerintahan desa dan peraturan tentang masyarakatnya sendiri Kepala Desa juga diberikan kewenangan untuk dapat mengurus pemerintahan dan mengurus kepentingan dari masyarakatnya yang dapat diartikan bahwa desa mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa dan juga mengelola kepentingan masyarakat sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Strategi Penurunan Stunting

Stunting diartikan sebagai kondisi buruk pada tumbuh kembang anak akibat dari kekurangan gizi yang sifatnya kronis sehingga anak memiliki

tubuh yang pendek pada usianya sebuah gangguan pada pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak akibat adanya kekurangan gizi yang kronis dan sifatnya sudah berulang-ulang sehingga menyebabkan adanya infeksi hal ini biasanya ditandai dengan tinggi badan pada anak dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemerintah pada Bidang Kesehatan.

Stunting dapat terjadi bukan hanya bermula pada balita tapi stunting terjadi sebelum dilahirkan atau masih berada di dalam kandungan hal ini biasanya terlihat pada umur dua tahun, maka dari itu asupan gizi yang diberikan oleh orang tua bukan hanya setelah lahir saja tetapi mencakupi kebutuhan gizi sejak di dalam kandungan. Perkembangan yang tidak baik pada anak mengakibatkan kemampuan berpikir pada anak tidak seperti anak pada umumnya, masalah gizi yang diukur berdasarkan panjang badan menurut umur atau disebut dengan (PB/U) dan dapat juga dengan tinggi badan (TB/U).

a) Penyebab Stunting Pada Anak

Faktor yang menyebabkan resiko stunting menurut Badan Kependudukan dan Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu sebagai berikut :

- 1) ASI tidak sesuai kebutuhan
- 2) Asupan anak tidak baik
- 3) Pola asuh tidak baik
- 4) Anak sering sakit

b) Dampak Stunting (Nedra, 2019) bahwa dampak dan gejala pada masalah stunting sebagai berikut :

- 1) Terdapat tubuh pendek pada anak di bawah angka rata-rata mempunyai proses pertumbuhan yang lambat
- 2) Memiliki proses pertumbuhan gigi terlambat
- 3) Terdapat buruknya kemampuan berpikir dan berdampak pada kefokusannya pada anak

Stunting memiliki dampak buruk pada anak baik itu dampak jangka panjang waktu yang pendek dan juga dapat berupa dampak jangka waktu pendek pada stunting dapat berupa terganggunya

perkembangan otak pada anak yang mempengaruhi kecerdasan adanya gangguan dampak dari jangka panjang pada stunting yang mampu menyebabkan terkait rendahnya kemampuan berpikir pada anak.

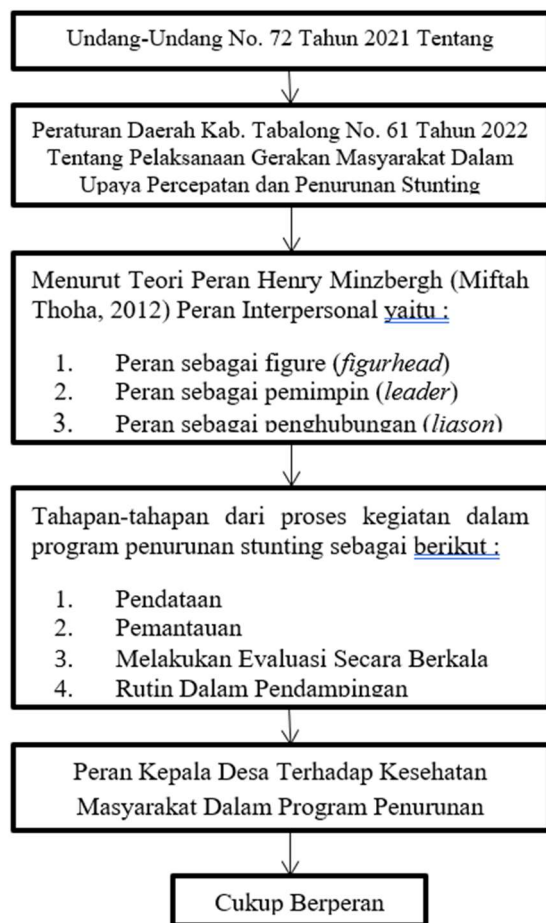
a. Percepatan penurunan stunting

TPPS yang ada di Desa/Kelurahan menjadi pelaksana langsung dalam pelayanan dan pendampingan terhadap keluarga yang menjadi sasaran penurunan stunting hal ini dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga. Tim Pendamping Keluarga adalah salah satu kelompok yang dijadikan sebagai perbaikan dari strategi percepatan penurunan angka stunting yang dilakukan dengan pendekatan kepada keluarga seperti calon pengantin, ibu hamil, dan ibu yang sedang menyusui, anak yang berusia 0-59 bulan.

Tim Pendamping Keluarga berasal dari kelompok tenaga pendamping yang ada di desa yaitu bidan, kader tim penggerak (PKK) dan terdapat kader KB tugasnya melakukan pendampingan terhadap calon pengantin.

Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Sumber: Peneliti 2025

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang memberikan sebuah gambaran awal yang jelas berlandaskan pada filsafat post positivism yang digunakan untuk meneliti pada suatu objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah secara gabungan, analisis dan bersifat induktif hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode pendekatan penelitian

kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan didalam suatu data terdapat mengandung sebuah makna.

- 1) Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan, penelitian lapangan pada dasarnya merupakan peristiwa yang sedang terjadi dimasyarakat secara realistis biasanya tujuan dari penelitian lapangan ini untuk menemukan solusi dari masalah sehari-hari. Penelitian ini diadakan di Desa Garunggung Kecamatan Tanjung.
- 2) Metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang lingkungan dan untuk menggambarkan realitas sosial yang terjadi dengan cara menarasikan dan mengilustrasikan keadaan terkini dari objek penelitian tentang fakta-fakta yang ada.

Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini merupakan kata-kata dan tindakan para informan maupun tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian maka data yang diperoleh berdasarkan sumber data sebagai berikut :

1. Data primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber. Data yang digunakan untuk analisis maupun untuk pembahasan hasil penelitian tentang evaluasi didapat dari Peran Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Kesehatan Masyarakat Dalam Program Penurunan Stunting Di Desa Garunggung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
2. Data sekunder
Data sekunder ialah data pendukung dalam penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara berupa laporan-laporan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, kondisi desa, struktur organisasi, visi dan misi serta jumlah

masyarakat yang berpartisipasi dalam program penurunan stunting.

Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data diatas, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung dilapangan secara sistematis serta akurat terhadap suatu fenomena yang ada sesuai dengan topic pembahasan dalam penelitian. Observasi yang dilakukan diharapkan dapat memperoleh data yang sesuai atau relevan dengan topik penelitian. Hal yang akan diamati yaitu bagaimana strategi yang dilakukan Aparat Desa dalam menekan laju penderita stunting di Desa Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti seperti buku-buku, jurnal, laporan-laporan, foto atau gambar, rekaman, peraturan perundang-undangan, hasil karya dan lain sebagainya.

3. Wawancara

Pada wawancara peneliti meminta supaya responden memberikan informan sesuai dengan yang dialami, diperbuat atau dirasakan sehari-hari dalam hal evaluasi program STUNTING di Desa Garunggung. Tujuan dilakukan wawancara ialah untuk mengetahui informasi secara langsung dan menadalam dari berbagai informan yang terlibat dalam program Stunting, wawancara dilakukan dengan *face to face* atau tatap muka langsung dengan informan sehingga terjadi kontak pribadi dan melihat langsung kondisi informan.

Teknik Analisis Data

Berikut penjelasan komponen-komponen teknik analisis data model interaktif dari empat aktivitas analisis data tersebut diatas yaitu :

- 1) Pengumpulan Data (*Data Collection*), yaitu kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data, pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).
- 2) Reduksi Data (*Data Reduction*), data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit.
- 3) Penyajian Data (*Data Display*), yaitu setelah data direduksi langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering dilakukan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat sementara, dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- 4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data (*Conclution Drawing/Data Verifikation*), yaitu sebuah aktivitas yang merumuskan kesimpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Kesimpulan ini dapat berupa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Rencana Keabsahan Data

Dalam penelitian ini digunakan uji kredibilitas data untuk menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi (Sugiyono, 2016) Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber, pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.
2. Triangulasi Teknik, pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan observasi, dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu, pengecekan data dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda

Dalam penelitian ini pengecekan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber, mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti wawancara, dokumentasi dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menemukan hasil yang didapatkan dari melihat peran Kepala Desa bagaimana kebijakan program stunting yang diterapkan Kepala Desa Garunggunung untuk mengurangi angka stunting dengan teori peran interpersonal (Henry Minzbergh, 2012) :

1. Peran Tokoh

Dari hasil observasi dan wawancara diatas diketahui bahwa 2 informan menjawab Kepala Desa memiliki peran sebagai tokoh dan 3 informan menjawab Kepala Desa tidak terdapat peran sebagai tokoh. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa sebagai tokoh dalam program penurunan stunting Desa Garunggunung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong berdasarkan jawaban informan dikategorikan belum berperan

2. Peran Pemimpin

Dari hasil observasi dan wawancara diatas diketahui bahwa ada 3 Informan yang menyatakan Kepala Desa memiliki peran sebagai pemimpin. Berdasarkan hasil

wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa sebagai pemimpin dalam program penurunan stunting Desa Garunggunung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong berdasarkan jawaban informan dikategorikan berperan

3. Peran Penghubung

Dari hasil observasi dan wawancara diatas diketahui bahwa ada 3 informan yang menjawab Kepala Desa memiliki peran sebagai penghubung. Maka dapat disimpulkan bahwa peran Kepala Desa sebagai penghubung dalam program penurunan stunting Desa Garunggunung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong berdasarkan jawaban informan dikategorikan cukup berperan.

Pembahasan

Dari hasil rekapitulasi jawaban wawancara tersebut serta dari pengamatan peneliti maka peneliti membahas dengan dukungan teori (Henry Minzbergh, 2012) yaitu peran sebagai *Interpersonal* yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui dan menganalisis peran Kepala Desa sebagai *Interpersonal* dalam program penurunan stunting Desa Garunggunung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan yaitu

Peran Kepala Desa sebagai *Interpersonal* dalam meningkatkan penurunan stunting yang dikemukakan oleh (Henry Minzbergh, 2012) dan indikator peran sebagai tokoh, peran sebagai pemimpin dan peran sebagai penghubung maka diketahui bahwa peran Kepala Desa sebagai *Interpersonal* dalam penurunan stunting cukup berperan, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan lima orang informan tentang peran sebagai pemimpin dan peran sebagai penghubung dikatakan cukup berperan.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa mengenai peran Kepala Desa sebagai *Interpersonal* dalam program penurunan stunting dari indikator peran sebagai tokoh belum berperan, peran sebagai pemimpin cukup berperan

dan peran sebagai penghubung cukup berperan dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hasil pembahasan di atas menunjukkan peran Kepala Desa pada program penurunan stunting Desa Garunggung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan cukup berperan.

Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan program penurunan stunting Desa Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan cukup berperan dilihat dari hasil observasi dan wawancara terhadap informan tentang peran Kepala Desa tersebut yaitu :

1. Kepala Desa telah memberikan dukungan terhadap program penurunan stunting dengan melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan kader kesehatan untuk mengalokasikan Anggaran Dana Desa untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi keluarga kurang mampu.
2. Menetapkan kebijakan dan memberikan arahan kepada Perangkat Desa terkait program penurunan stunting dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam menyusun dan menjalankan program penurunan stunting, keterlibatan langsung dalam pemantauan, edukasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan agar program berjalan lebih efektif
3. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik internal (perangkat desa, kader kesehatan) maupun eksternal (Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan pemerintah kabupaten) program penurunan stunting di Desa Garunggung telah berjalan dengan adanya kebijakan dan dukungan Anggaran Dana Desa dari Pemerintah Desa dalam program ini masih bergantung pada sosialisasi yang dilakukan oleh kader Posyandu dan Puskesmas.
4. Diperlukan evaluasi untuk memastikan bahwa program ini memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat keterlibatan Kepala Desa langsung dalam kegiatan lapangan masih perlu

ditingkatkan agar masyarakat merasa lebih diperhatikan dan lebih sadar akan pentingnya program penurunan stunting.

KESIMPULAN

Melihat hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan tema “Peran Kepala Desa Terhadap Kesehatan Masyarakat Dalam Program Penurunan Stunting Desa Garunggung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan” dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan program penurunan Stunting Desa Garunggung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan cukup berperan.

SARAN

1. Kepala Desa
Dalam keterlibatan terhadap program penurunan stunting diharapkan agar pihak Kepala Desa Garunggung bisa ditingkatkan untuk memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dan mengoptimalkan komunikasi dengan masyarakat agar program berjalan dengan lancar.
2. Masyarakat Desa Garunggung
Peran masyarakat dalam program penurunan stunting yang ada di Desa Garunggung agar terus bisa ditingkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting dengan berpartisipasi aktif dalam program yang ada di Desa Garunggung menjalin komunikasi dengan Pemerintah Desa
3. Peneliti Selanjutnya
Diharapkan agar peneliti selanjutnya untuk terus melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan program penurunan stunting dan mencari solusi untuk mengatasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdoellah Awan & Yudi Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.

- Adriany, F. et al. (2021). Hubungan sanitasi lingkungan dan pengetahuan dengan kejadian stunting pada balita di wilayah Puskesmas Rambah. *Jurnal Kesehatan Global*.
- Awaludin Muhammad Fajar & Rachmat Ramdani. (2022, Januari). Peran Kelompok Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan dan Keberagaman (Studi Deskriptif PC NU Kabupaten Karawang Dan Pengurus Vihara Nam Hai Kwan SeIm Pu Sa Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
- Ayuningtyas Dumilah, et al. (2018, Maret). Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9, 1-10.
- Dewi Ni Wayan Erviana Puspita & Ni Komang Sri Ariani. (2022). Hubungan Pendapatan dan Asi Eksklusif dengan Kejadian Stunting pada Balita. *Jurnal Malahayati Nursing*, 4.
- Haria Dartianis, et al. (2023, April 30). PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DESA DI DESA BERTAH KECAMATAN TIGA PANAHA KABUPATEN KARO. *Journal Governance Opinion*, 8, 10-18.
- Hasanah Rochmatun, et al. (2023, Februari). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting Pada Anak Balita. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2.
- Hutahaean W. S. (2021). *FILSAFAT DAN TEORI KEPEMIMPINAN*. Malang: AHLIAMEDIA PERSS.
- Karso, A. J. (2024). *Buku Ajar Pemerintah Nasional*. (S. M. Eri Setiawan, Ed.) Jawa Tengah: CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- LANTAEDA SYARON BRIGETTE, et al. PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RPJMD KOTA TOMOHON. *Jurnal Administrasi Publik*, 4.
- Lestari Puji, et al. (2022, Oktober). Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2227-2230.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Jawa Timur: Repository IPDN.
- Mulyawan, R. (2015). *Sistem Pemerintah Indonesia*. (A. K. Hibar, Ed.) Bandung: Unpad Press.
- Mu'ah, et al. (2019). *KEPEMIMPINAN*. DEPOK: PT Raja Grafindo Persada.
- Nur Andi & Muhammad Guntur. (2019). *Analisi Kebijakan Publik*. Makasar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makasar.
- NURELISA. (2023). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN MAMUJU KABUPATEN MAMUJU= The Role of Local Government in Reducing Stunting in Mamuju District (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Pantola, T. (2024). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM INTERVENSI PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI DESA MAURISU TENGAH KECAMATAN BIKOMI SELATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Journal repostory.unimar*.
- Regita Fina & Ananta Prathama. (2023, April). Peran Pemerintahan Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 12, 28-41.
- Sari, D. R. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI PEKON PAMENANG KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN

- PRINGSEWU TAHUN 2021. *Journal digilib.unila*.
- Sarwadhmana Jaka, et al. (2023). *DASAR–DASAR ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN*. (R. R. Eri Setiawan, Ed.) Jawa Tengah: CV. EUREKA MEDIA AKSARA.
- Sarwono, S. W. (2014). *Teori-teori psikologi sosial*. Raja Grafindo Pers.
- Satria Wahyu Indra, et al. (2021, Juli 2). Definisi Sistem Portal Pengetahuan Dalam Pemerintahan Berdasarkan Pendekatan Modifikasi SoftSystemMethodology dan Hermeneutic. *Jurnal Informatika Kesatuan*
- Soekanto, S. (2002). *SOSIOLOGI SUATU PENGANTAR*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, P. D. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN KOMBINASI (MIXED METHODS)*. (M. Dr. Ir. Sutopo, Ed.) Bandung: Alfabeta.
- SUKAESI, S. (2024). PERAN PEMERINTAHDALAM PENGENDALIAN STUNTING DI DESA LAIYAKECAMATAN CENRANAKABUPATEN MAROS. *digilibadmin.unismuh*.
- Thoha, M. (2019). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- WAHYUNI, S. (2023, Mei). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DI DESA MOJOPURNO KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN. *Repository Muhammad University*.
- Wijaya Mendra, et al. (2024). *ILMU PEMERINTAHAN INOVASI DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN*. (A. P. Hawari, Ed.) Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Zondha, M. C. (2023, Oktober 18). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENURUNKAN STUNTING (Studi Di Desa Pubasu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan). *Repository Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting*. Lembaran Negara RI Tahun 2021 bab 2.
- Pemerintah Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Dalam Upaya Percepatan dan Penurunan Pencegahan Stunting*. Lembaran RI Tahun 2022. No 62. Sekretariat Negara. Jakarta
- Kalsel, H. D. (2024, Juni 28). Komisi IV DPRD Kalsel Kaji Banding Program Unggulan Penurunan Angka Stunting DIY. *WordPress*.
- Kesehatan, K. (2024). Panduan Hari Gizi Nasional ke 64 Tahun 2024. *Ayosehat.kemkes*.
- PMK, K. (2023, Juli 1). Perlu Terobosan dan Intervensi Tepat Sasaran Lintas Sektor untuk Atasi Stunting. *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*.